

**PEMBANGUNAN BERBASIS GENDER MAINSTREAMING**  
**(Studi Analisis Gender Implementasi Program Gender Watch Di Gresik)**

**Muhammad Nur Taufiq**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
muhnurtaufiq@gmail.com

**Refti Handini Listyani, S.Sos., M.Si.**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
dinibening@yahoo.co.id

**Abstrak**

Pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Keterlibatan perempuan pada pembangunan masih dihadapkan pada beragam persoalan dan faktor yang mempengaruhi ketidakadilan gender. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, khususnya membangun kepemimpinan perempuan. Teknik analisis gender pada penelitian ini menggunakan pendekatan Pengarusutamaan Gender dengan Model Longwe atau Kreteria Pembangunan Perempuan, Model Longwe digunakan sebagai suatu metode untuk melihat pemberdayaan perempuan yang menggunakan kategori analitis yang saling berkaitan yang meliputi; Kesejahteraan, Akses, Kesadaran Kritis, Partisipasi dan Kontrol. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan yang ber-pengarusutamaan gender akan memberi peluang perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan.

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, Kebijakann

**Abstract**

Gender Mainstreaming as the development strategy in the achievement of gender equality and justice. There is no verb, thus it can't be called a sentence. Women's involvement in development still faced with various issues and factors affecting gender inequality. This study aims to explain how women's empowerment can increase women's participation in development, especially for building women's leadership. Technique analysis gender for this research used the gender mainstreaming with a model Longwe or kreteria development women, model longwe used as a method of to see women empowerment that uses category analytical interlocking which includes; welfare, access, critical awareness, participation and control. Based on the research done policies the gender-mainstreaming policy, it will give women opportunities to achieve equity and justice in development.

**Keywords:** Gender Mainstreaming, Empowerment, Policy

**PENDAHULUAN**

Sebagai negara ketiga “negara berkembang” kebutuhan pada upaya pembangunan (*development*) diberbagai sektor menjadi keperluan primer, hal tersebut tentu harus diikuti dengan perencanaan pembangunan yang penuh pertimbangan dan hati-hati sebagai respon terhadap muatan-muatan lokal di dalamnya baik itu pada demografi sosialnya, sumber daya manusia, geografis, ekonominya, politik, kesehatan dll, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan sampai pada suatu kondisi masyarakat yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia dalam hal ini diamanatkan kepada pemerintah, di mana pemerintah memiliki tugas dan keterlibatan untuk merealisasikan pembangunan sebagaimana tujuan dan cita-cita Nasional yang dibungkus dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Isu gender menjadi penting dalam memproyeksi pembangunan, hal ini karena semua aspek yang

berkaitan dengan pembangunan atau sub pembangunan akan melibatkan dan bersentuhan langsung dengan manusia, artinya manusia atau masyarakat menjadi esensi utama suatu pembangunan dalam artian luas. Paradigma pembangunan dalam sudut apapun perlu melihat keterkaitan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai faktor yang utama pembangunan. (Mosse, 2007:24) Pandangan pembangunan ini benar-benar mensyaratkan penyusunan kembali kepentingan-kepentingan khususnya perhatian terhadap lapisan penduduk nasional yang beresiko, terutama kaum miskin pedesaan dan perkotaan serta diantara mereka memberi perhatian khusus kepada perempuan.

Begitu perhatian dan penghargaan dunia yang tinggi akan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari keberhasilan tujuan pembangunan, menuntut untuk setiap negara ikut berperan dalam

mencapai target pembangunan pada semua lini pembangunan termasuk Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, adalah salah satu instrumen HAM Internasional dalam perwujudan pemajuan dan mendorong hak serta kebebasan manusia sebagai landasan dari keadilan, kebebasan dan kedamaian (Luhulima, 2014: 5). Dalam deklarasi tersebut juga menekankan pada upaya setiap negara untuk mencapai keadilan gender sebagai bagian dari HAM.

Kompleksnya permasalahan sosial berkenaan pembangunan dapat bersumber dari ketidakadilan termasuk dalam ketimpangan gender, kemudian jika ditelusuri lebih dalam persoalan tersebut maka pihak perempuanlah yang kerap kali paling banyak dirugikan. Contohnya partisipasi perempuan dalam akses, banyak perempuan yang tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki baik tersebut dalam pengambilan keputusan atau kesempatan pada pendidikan, terlebih pada perempuan pedesaan yang rentan mengalami putus sekolah. Sebab yang mendasar adalah pandangan masyarakat pedesaan yang masih melihat perempuan tidak bisa lepas dari tugas dan fungsi di wilayah domestik, pada praktiknya dipersempit perannya sebagai ibu dan mengurus keluarga, sehingga dianggap tidak perlu pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi dirinya diluar pekerjaan domestik.

Perempuan dan pembangunan dalam konteks ini pembangunan juga mencakup upaya mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat atau penduduk agar memperoleh kualitas hidup yang baik, yang bentuknya berupa jaminan sosial. Di Indonesia pelaksanaan jaminan sosial masih menemui beragam persoalan terlebih kepada penerima masyarakat miskin. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh aktivis terkait pelaksanaan sistem jaminan sosial atau perlindungan sosial dirasa masih belum berspektif gender dan belum pro terhadap masyarakat miskin dan marginal.

Berdasarkan data Badan Pusa Statistik (BPS) menunjukkan jumlah perempuan di Indonesia mencapai 49,7 persen dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta orang. Jika hanya 39 persen saja masyarakat Indonesia, yang mempunyai skema jaminan kesehatan, maka banyak sekali perempuan Indonesia yang tidak tercover jaminan kesehatan. (nasional.kompas.com)

Perempuan dalam banyak struktur budaya yang patriarki selalu memperoleh posisi dominan dalam mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Masalah tersebut disebabkan oleh beragam hal, salah satunya yang tampak jelas ialah produk politik sosial dan budaya yang terus berkembang di masyarakat dengan konsep yang masih berperspektif laki-laki

“patriarki”, hal tersebut kemudian memunculkan beragam bentuk-bentuk ketidakadilan yang pada konteks ini banyak diterima oleh perempuan. Sebagai mana yang digambarkan bahwa bentuk-bentuk peradaban manusia yang menjustifikasi fenomena ketertindasan perempuan itu telah tergambar dalam fragmentasi sejarah di berbagai belahan dunia (Nugroho, 2011:41).

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat baik tersebut laki-laki atau perempuan sebagai subyek dari pembangunan, termasuk poin didalamnya adalah untuk tercapainya keadilan yang berspektif gender. Selain menghadapi kompleksnya isu yang ada kajian Gender sampai saat ini, nyatanya masih memiliki daya tarik tersendiri untuk terus diurai sebagai respon dari fenomena sosial yang ada, maka perlu upaya-upaya untuk mencari penyelesaiannya melalui berbagai keilmuan terlebih dalam disiplin ilmu sosial. Berlangsungnya ketidakadilan gender seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ternyata juga mempunyai implikasi terhadap persoalan kesehatan reproduksi (*reproductive health*) dan hak-hak reproduksi (*reproductive right*).

Secara global, isu kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi baru memperoleh perhatian khusus setelah dilangsungkannya Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population Development - ICDP*) di Kairo, Mesir pada 1994. Hasil dari konferensi ICPD 1994, diantaranya adalah kesepakatan bagi setiap negara untuk merubah paradigma dalam mengelola permasalahan kependudukan dan pembangunan yang mempopulerkan Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual atau *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR), misinya adalah: kesetaraan gender, hak asasi manusia, perubahan iklim, dinamika populasi, konflik, bencana alam, ketahanan pangan dan gizi, serta akses terhadap sumber daya alam. Selain itu, ICPD dalam hal ini juga mencakup hak semua orang untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan seperti yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia (Dwiyanto dan Darwin, 1996: 23). Selain kesepakatan dalam ICDP, dukungan sama juga datang dari Deklarasi Milenium (*Millenium Declaration*) di New York pada September 2000, hasilnya berupa komitmen bersama kepala negara dan perwakilan negara anggota PBB dalam percepatan pembangunan yang terukur, utamanya bagi negara berkembang. Keterlibatan Indonesia menjadi langkah penting sebagai negara anggota Deklarasi Milenium yang mendukung pemajuan hak asasi manusia secara universal, khususnya pada perempuan dalam pemajuan hak, kesetaraan dan keadilan gender. Maka menarik

untuk melihat berlangsungnya upaya pemberdayaan perempuan melalui gerakan pendidikan penyadaran gender yakni *Gender Watch* di Kabupaten Gresik bersama KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan) sebagai pihak perencana dan pelaksana Program. Program tersebut merupakan bentuk kongkrit dari KPS2K melalui Program *Gender Watch* yang bermitra dengan pemerintah Kabupaten Gresik untuk merealisasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan. *Gender Watch* merupakan program yang diperuntukan bagi perempuan miskin dan marginal.

Salah satu output dari berlangsungnya *Gender Watch* sampai saat ini adalah dengan terbentuknya komunitas Sekolah Perempuan di empat desa di Gresik. Sekolah Perempuan merupakan wadah bagi perempuan akar rumput dan penerima manfaat dari tujuan *Gender Watch* yakni untuk melakukan pemantauan terhadap program Jaminan Sosial dari pemerintah Gresik, maka Sekolah Perempuan sebagai alternatif melakukan pemberdayaan dalam membekali anggotanya dalam proses-proses tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pengarusutamaan Gender (Pug)

Kesetaraan gender masih menjadi menu utama dalam pembangunan, upaya yang telah dilakukan agar tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan masih menuai beragam tantangan. Pratiknya adalah perempuan masih berada posisi yang tertinggal jika dibandingkan laki-laki, akibatnya perempuan mengalami banyak kemunduran diberbagai bidang pembangunan. Kesenjangan tersebut bisa dilihat dari akses perempuan yang terbatas karena kurang pahaman tata kelola dan regulasi yang ada masih melihat perempuan sebagai subyek kedua dari pembangunan.

Tabel 2 Isu Kesenjangan Gender

| N o. | Isu-isu         | Perempuan                             | Laki-laki                              | Keterangan                            |
|------|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1.   | Ketenagakerjaan | TPAK : Pr. 51,39%<br>Upah : 1.368.549 | TPAK : Lk-2 84,42%<br>Upah : 1.724.478 | Akses pekerjaan                       |
| 2.   | Pendidikan      | Buta huruf : 8,9%                     | Buta huruf : 3,9%                      |                                       |
| 3.   | Hukum           |                                       |  | 342 peraturan daerah yang bias gender |

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2017

Salah satu upaya sebagai strategi pembangunan dalam meningkatkan peran perempuan adalah melalui pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan dan akses yang sama melalui beragam penguatan salah satunya melalui regulasi kebijakan. Pembagian kerja berdasarkan gender, dan cara pembagian kerja dipahami oleh para perencana pembangunan, memiliki konsekuensi penting atas jenis pembangunan yang akan dijalankan (Mosse, 2007:28).

Di Indonesia pelaksanaan Pengarusutamaan Gender merupakan komitmen Nasional yang secara yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari diratifikasinya Konvenan Internasional yakni berupa Instruksi Presiden No. 9 Tahun 200 tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender atau gender mainstreaming adalah sebuah upaya yang saling berkaitan berkenaan perencanaan dan regulasi kebijakan dalam pembangunan yang responsif gender, hal ini bertujuan agar tercapainya kesetaraan dan keadilan disegala semua bidang pembangunan, dalam hal ini perhatian utamanya adalah perempuan.

Hak Asasi Perempuan dalam pembangunan sebagai bentuk pemajuan terhadap HAM terus dipopulerkan secara global, ini ditandai dengan diakuinya HAM dengan sadar, agar terwujudnya kerdaulatan yang utuh bagi seluruh umat manusia. Wacana HAM Internasional bermula pada 10 Desember 1948, melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Wacana HAM Internasional terus berkembang, PBB dalam komitennya juga mengesahkan dua konvenan HAM, yaitu: Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang selanjutnya oleh DUHAM dua konvenan ICCPR dan ICESCR disebut sebagai *International Human Right* pada Desember 1966.

Tahun 1975, langkah-langkah untuk merumuskan strategi bagi pemajuan hak perempuan yang diwujudkan dalam Konferensi Sedunia tentang Perempuan ke-1 di Mexico City, dari konferensi tersebut menghasilkan suatu rumusan yakni Rencana Aksi Dunia atau *World Plan of Action* bagi pemajuan perempuan. Majelis Umum PBB dengan dilatarbelakangi konferensi tersebut kemudian mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada 18 Desember 1979. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* pada prinsipnya menekankan pada aspek kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, yaitu persamaan dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan dan akses serta persamaan hak untuk menikmati manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan (Luhulima, 2014:45).

Bentuk dukungan negara anggota PBB kepada pemajuan HAM Internasional khususnya Perempuan, diikuti juga oleh Indonesia. Komitmen tersebut dapat dilihat dengan diratifikasinya CEDAW kedalam

undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1984, pada tanggal 24 Juli 1984. CEDAW dalam pasal-pasalnya membagi substansi didalamnya sebagai berikut.

**Tabel 2 Pasal-Pasal dalam CEDAW**

| Pasal              | Isi  |
|--------------------|--|
| <b>Pasal 1</b>     | Definisi Diskriminasi terhadap Perempuan   |
| <b>Pasal 2</b>     | Kebijakan yang Harus Dilakukan untuk Menghapuskan Diskriminasi                                       |
| <b>Pasal 3</b>     | Jaminan tentang Hak dan Kebebasan Fundamental atas dasar Hak yang Sama antar perempuan dan laki-laki |
| <b>Pasal 4</b>     | Tindakan Khusus Sementara untuk Mencapai Kesetaraan  |
| <b>Pasal 5</b>     | Peran Stereotipe dan Prasangka   |
| <b>Pasal 6</b>     | Prostitusi   |
| <b>Pasal 7</b>     | Kehidupan Publik dan Politik   |
| <b>Pasal 8</b>     | Partisipasi pada Tingkat Internasional   |
| <b>Pasal 9</b>     | Kewarganegaraan  |
| <b>Pasal 10</b>    | Hak yang sama dalam Pendidikan   |
| <b>Pasal 11</b>    | Ketenagakerjaan  |
| <b>Pasal 12</b>    | Kesehatan dan Keluarga Berencana   |
| <b>Pasal 13</b>    | Ekonomi dan Mafaat Sosial  |
| <b>Pasal 14</b>    | Perempuan Pedesaan   |
| <b>Pasal 15</b>    | Persamaan Dimuka Hukum   |
| <b>Pasal 16</b>    | Perkawinan dan Hukum Negara  |
| <b>Pasal 17-22</b> | Rincian Pendirian dan Fungsi dari CEDAW  |
| <b>Pasal 23-30</b> | Rincian Administrasi CEDAW   |

Sumber: Jurnal Perempuan 85, 2015

Prinsip-prinsip yang dianut pada Konvensi CEDAW terbagi menjadi tiga, prinsip-prinsip tersebut merupakan kerangka standar yang dipakai sebagai tolok ukur dalam pemajuan hak perempuan, diantaranya adalah:

**Pertama:** Prinsip Persamaan (Kesetaraan dan Keadilan) Substantif, prinsip ini menekankan pada suatu langkah nyata mewujudkan hak perempuan sebagai bentuk untuk mengatasi adanya perbedaan, kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan. Kemudahan mewujudkan perubahan lingkungan serta mewajibkan negara untuk mendasari suatu kebijakan dan langkah-langkah sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam kesempatan, dalam akses, dan persamaan hak dalam menikmati manfaat dari kesempatan dan peluang secara sama bagi laki-laki dan perempuan. Konvensi CEDAW dalam substansinya juga menganut prinsip persamaan hak kedudukan dan perlakuan dalam hukum bagi laki-laki dan perempuan, kemudian persamaan hak hukum yang meliputi kewarganegaraan, kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan serta hubungan keluarga, dan dalam perwalian anak.

**Kedua:** Prinsip Nondiskriminasi, CEDAW mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW:

“istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atas tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (Achie Sudiarta Luhulima, 2014:48).”

Prinsip Nondiskriminasi memuat Rekomendasi Umum No. 19, 1992, tentang Kekerasan terhadap Perempuan, yakni:

a. Definisi diskriminasi terhadap perempuan’ seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang berlangsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

b) Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasarkan konvensi hak asasi manusia, adalah diskriminasi dalam arti Pasal 1 Konvensi CEDAW.

**Ketiga:** Prinsip Kewajiban (Tanggung Jawab - Akuntabilitas) Negara, menurut CEDAW Negara memiliki kewajiban meliputi: a). Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya. b). Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah-tindakan atau tindakan-khusus-sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada. c). Tidak saja menjamin secara de-jure tetapi juga secara de facto. d). Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di ranah privat (domestik-keluarga) dan ranah swasta (Luhulima, 2014:54).

### Women In Development (Wid)

Pemikiran modern tentang modernisasi pembangunan negara-negara Internasional, didapatkan bahwa pembangunan merupakan proses pemajuan yang berjalan linear dan pasti. Namun faktanya perempuan banyak mengalami ketertinggalan dalam proses-proses pembangunan, artinya posisi perempuan masih tertinggal dalam proses-proses pembangunan, baik sebagai pelaku atau objek penerima manfaat dari pembangunan (Handayani dan Sugiarti, 2006:37).

Melihat ketertinggalan perempuan dalam pembangunan adalah karena tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat oleh beragam sebab, salah satunya karena stereotipi dan subordinasi yang berlaku dilingkungan sosialnya, yang kemudian perempuan tidak

bisa berkembang mendapatkan dan menerima manfaat dari pembangunan. WID sebagai strategi dan pendekatan yang melihat perempuan dalam pembangunan melalui dua fokus, pertama prinsip egalitarian, yakni suatu padangan bahwa semua manusia adalah sama sederajat, yang membedakannya adalah status dan peran sosialnya. Kemudian yang ke dua adalah upaya pemberdayaan baik itu berupa kebijakan atau regulasi sebagai cara untuk menghapuskan ketidakadilan terhadap perempuan sehingga nantinya perempuan mampu berpartisipasi dalam pembangunan sebagaimana laki-laki.

WID adalah upaya memajukan peran perempuan yang saling terintegrasi pada pembangunan. Keterlibatan perempuan adalah tujuan dalam pembangunan agar dapat berpartisipasi dan memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana egalitarian, seperti kesempatan pada pendidikan, pekerjaan, politik dan aspek pembangunan lainnya.

## **METODE**

Kerangka pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami bagaimana implementasi pengarusutamaan gender pada program pembangunan perempuan *Gender Watch* di empat desa berlangsungnya program *Gender Watch* di Kecamatan Wringinanom. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian untuk dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi (Melong, 2007:6).

Data yang disajikan dalam penelitian kualitatif mengutamakan hasil dari keadaan di lapangan yang diperoleh selama penelitian. Data tersebut meliputi hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen lainnya yang mendukung. Kemudian dari data tersebut dianalisis dan dideskripsikan dengan pendalaman kajian sedekat mungkin dari sumber data yang diperoleh peneliti. Bentuk deskripsi laporan penelitian seringkali berisi kutipan-kutipan dalam bentuk narasi tertentu atau berisi suatu pandangan terhadap objek yang diamati. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis dimana peneliti berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu (Handayani, 2006:55).

Teknik analisis gender pada penelitian ini menggunakan pendekatan Pengarusutamaan Gender dengan Model Longwe atau Kreteria Pembangunan Perempuan, Model Longwe digunakan sebagai suatu metode untuk melihat pemberdayaan perempuan yang menggunakan kategori analitis yang saling berkaitan yang meliputi; Kesejahteraan, Akses, Kesadaran Kritis, Partisipasi Dan Kontrol.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Peran Program Gender Watch Dalam Pemberdayaan Perempuan Akar Rumput**

Kondisi masyarakat khususnya perempuan yang tergabung dalam Sekolah Perempuan di 4 desa program Gender Watch cukup beragam mulai dari ibu rumah tangga, buruh pabrik, pekerja swasta atau buruh tani dan mereka umumnya sudah berkeluarga. Partisipasi terhadap pendidikan masyarakat sekitar terbilang masih rendah, hal tersebut dibuktikan dengan banyak temuan di lapangan, dimana angka anak putus sekolah di empat desa program Gender Watch yakni Kesamben Kulon, Mondoluku, Sooko dan Sumber Gede masih tinggi. Misalnya saja desa Kesamben Kulon tercatat ada 870 perempuan yang putus sekolah, sedangkan Mondoluku ada 70 perempuan putus sekolah, hal serupa juga terjadi di desa Sooko dan Sumber Gede.

Masih minimnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan terlebih bagi perempuan ditambah dengan pemberian stereotipe negatif dimana masyarakat sekitar masih kental dengan budaya Jawa dikelas mereka yang menganggap perempuan tidak terlalu perlu mengenyam pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena menganggap perempuan nantinya juga akan berkulat sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak, suami dan keperluan rumah. Seperti yang diungkapkan dari pengalaman Lilik bersama teman-teman Sekolah Perempuan ketika mencoba memberi arahan, bimbingan kepada perempuan disekitar desa mereka yang akan berhenti bersekolah atau memutuskan untuk menikah muda, dan para orang tua dan masyarakat yang mencoba menikahkan anak perempuan mereka diusia muda.

Berkaitan dengan program Gender Watch yang telah berlangsung di Kecamatan Wringinanom, program pemantauan JKN-PBI ini bisa disebut sebagai program pembangunan perempuan yang bergerak pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan akar rumput. Ada pun bentuk kegiatan dari program *Gender Watch* diantaranya *capacity building* melalui wadah yakni komunitas yakni Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan sendiri merupakan bagian dari program *Gender Watch*, dari komunitas sekolah tersebut perempuan yang tergabung didalamnya memperoleh wadah untuk mengaktualisasikan diri serta berpartisipasi membahas dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi perempuan dilingkungannya, secara bersama-sama membangun kesadaran kritis, membangun potensi dan kepercayaan diri perempuan akar rumput. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperbaiki keadaan dilingkungannya khususnya kondisi perempuan menuju ke yang lebih baik, sehingga tercipta kondisi yang lebih adil.

Manfaat dan perubahan yang diperoleh dari anggota Sekolah Perempuan melalui program *Gender Watch*, meskipun dalam program tersebut tujuannya sebagai program pemantauan jaminan sosial, namun disini lain program tersebut juga membawa perubahan yang positif baik di wilayah diri masing-masing anggota Sekolah Perempuan, dilingkungannya dan ditingkat Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Salah satunya perubahan yang paling tampak jelas dirasakan oleh para anggota Sekolah Perempuan yakni rasa percaya diri, lebih berani untuk berpendapat dan

berpartisipasi, hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan perempuan akar rumput untuk terlibat dan urun pendapat dalam permasalahan yang ada di lingkungan mereka masing-masing baik itu di wilayah keluarga, bermasyarakat, pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai pada forum-forum terbuka.

Melalui program *Gender Watch* anggota Sekolah Perempuan dibekali pengetahuan dan kemampuan yang nantinya diharapkan mampu membangun kapasitas perempuan akar rumput untuk terlibat pada proses-proses pembangunan dan ikut merubah secara bertahap pandangan di lingkungan masyarakat mereka bahwa perempuan tidak selalu tentang *Macak, Manak, Masak*.

Adapun program yang telah dilaksanakan pada *Gender Watch* melalui Sekolah Perempuan dapat dibagi kedalam tiga kategori pertama, Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan (*livelihood*), kedua advokasi dan monitoring dan ke tiga penguatan akar rumput.

## PENUTUP

### Simpulan

Program *Gender Watch* yang dikelola oleh KPS2K dalam pemberdayaan perempuan akar rumput di empat desa program di Kecamatan Wringinamon dapat dikatakan membawa banyak perubahan kepada perempuan akar rumput miskin dan marginal. Perubahan atau dampak tersebut bisa dilihat dari keterlibatan perempuan di wilayah publik, serta kesadaran kritis perempuan miskin dan marginal terkait hak serta kondisi yang dialaminya, demikian tersebut dapat dilihat dari keterlibatan perempuan dalam kegiatan pengambilan keputusan ditingkat desa atau pemerintahan, seperti keterlibatan pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat Desa dan Kecamatan yang mana pada kegiatan musrenbang sebelumnya keberadaan perempuan tidak diperhitungkan.

Selain itu melalui Sekolah Perempuan, perempuan akar rumput memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak untuk terlibat pada beberapa program baik yang datang dari pemerintah atau non pemerintah misalnya mbak Bulan di undang pada kegiatan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), kemudian mbak Lilik yang mendapat kepercayaan untuk terlibat dalam program Keluarga Harapan untuk masyarakat miskin. Kemudian dari hasil wawancara kepada perempuan anggota Sekolah Perempuan mereka mengungkapkan banyak perubahan yang mereka rasakan dalam relasi keluarga mereka, misalnya dalam hal pembagian kerja dan peran di keluarga, perempuan anggota Sekolah Perempuan secara pelan-pelan dapat mempengaruhi suami mereka melalui komunikasi yang baik untuk bertahap memahami konsep dan relasi gender dalam keluarga mereka, yang pengetahuan tersebut mereka dapatkan dari kegiatan Sekolah Perempuan,

Fakih, Dr. Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.

Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Pusat Studi dan Kemasyarakatan UMM.

Jurnal Perempuan 85. 2015. *Instrumen Gender Internasional*. Vol. 20. Jakarta.

Luhulima, Achie Sudiarti. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nugroho, Riant. 2011. *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Ed II.

Triwijati, NKE & Bakti Dwi Andri. 2005. *Meniti Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan*. Jakarta. Lutfansah Mediatama.

Wahid, Abdurrahman dan dll. 1996. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Wirawan, I.B. 2012. *Toeri-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Prilaku Sosial)*. Jakarta. Kencana.

### On line:

Musdah Mulia. 2014. "Mengetahui Beragam Cara Sunat Perempuan". Dalam Jurnal Perempuan. 18 Oktober 2015.

Nur Aisyah. 2 Desember 2013. *Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)* hal. 212 (online), (<http://ejournal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/346>, diunduh 5 November 15).

TI Produksi. 2011. "Larangan Khitan Perempuan". Dalam Kompas.com. 18 Oktober 2015

Wahid Nurdin. 2015. "Demo Tuntut Cuti Haid, Dua Buruh di Pematangsiantar Dipecat". Dalam Tribunnews.com, 19 Oktober. Surabaya.

2009. "Wah... Banyak Remaja Menikah di Usia Dini!". Dalam Kompas.com. 18 Oktober 2015.

Yohanie Lingasari. 2015. *Belasan Ribuan Anak Nikah Dini karena Terlanjur Hamil*. Dalam [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 2 Januari 2016.

Rafki Hidayat. 2015. Kekerasan seksual pada perempuan dan inferioritas laki-laki. dalam [www.bbc.com](http://www.bbc.com), 2 Januari 2016.

## Daftar Pustaka